



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MEMPERCEPAT DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak aset dan potensi untuk berpenghasilan tinggi melalui praktik ekonomi dan keuangan syariah. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi dalam bentuk digitalisasi dalam semua sektor melalui teknologi transversal, yaitu teknologi yang dapat diterapkan secara lintas sektor dimana diyakini memiliki potensi untuk mengubah atau meningkatkan berbagai aspek kehidupan manusia tanpa terbatas pada satu bidang khusus. Teknologi transversal seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, dan komputasi awan terbukti memiliki dampak luas dan dapat digunakan dalam berbagai sektor, khususnya ekonomi dan bisnis sehingga memungkinkan gerakan ekonomi dan keuangan syariah lebih lincah, adaptif, dan transformatif baik di masa kini maupun yang akan datang.

Salah satu contoh digitalisasi yang sudah mulai berjalan dalam bentuk platform adalah aplikasi "Satu Wakaf Indonesia" yang telah diluncurkan sejak 26 Oktober 2023. Aplikasi ini diharapkan akan meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan wakaf melalui pemanfaatan digitalisasi dan inovasi digital sehingga ke depan akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri halal. Diluncurkannya aplikasi ini juga diharapkan akan memperluas pemanfaatan digitalisasi sehingga seluruh pegiat ekonomi syariah dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Sejalan dengan proses mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah tersebut, maka saat ini Pemerintah perlu menyiapkan tiga langkah penting. *Pertama*, meningkatkan dan memperluas penggunaan perangkat digital atau inovasi digital dalam efisiensi dan produktivitas industri halal. Langkah penting ini diwujudkan dalam bentuk meluncurkan Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) dan aplikasi Satu Wakaf Indonesia dimana MPIHI nantinya menjadi referensi utama bagi perkembangan industri halal Indonesia, sementara aplikasi Satu Wakaf Indonesia nantinya akan mengintegrasikan platform nasional dari berbagai lembaga wakaf dan amil zakat. *Kedua*, meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah dengan target setidaknya mencapai 50 persen dari pangsa pasar yang tersedia. Target ini dapat terwujud dengan menciptakan strategi komunikasi, narasi, dan kanal informasi yang sesuai dengan perkembangan terbaru agar dapat diterima dan dipahami oleh generasi muda dan calon pemimpin masa depan. *Ketiga*, menjaga konsistensi dan keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah. Langkah ini diwujudkan dalam bentuk sinergi dan koordinasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan sehingga ke depan dokumen Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024-2049 dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Sejalan dengan langkah tersebut, Pemerintah juga perlu mengantisipasi adanya risiko terkait perlindungan data konsumen dan cyber security melalui peningkatan edukasi mengenai pemahaman tentang digitalisasi produk dan layanan keuangan, serta pemahaman tentang manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu mewujudkan regulasi yang kuat serta penegakan hukum konsisten terkait praktik digitalisasi ekonomi syariah.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu:

1. Mendorong praktik digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah antara lain melalui regulasi dan pengawasan yang ketat guna mencegah kebocoran data pribadi dan keamanan informasi yang saat ini masih menjadi ancaman serius. Penggunaan digitalisasi teknologi yang meluas harus dikawal dan dibarengi pengamanan secara ketat agar data pribadi dan informasi penting tersebut dapat terlindungi dengan baik.
2. Mendorong Pemerintah untuk mempersiapkan strategi dalam mewujudkan digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia dalam bentuk literasi atau edukasi publik dalam bentuk strategi komunikasi, narasi dan kanal informasi yang sesuai dengan perkembangan terkini sehingga mudah diterima dan dipahami oleh generasi muda.
3. Mendorong seluruh aktor dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah dengan merealisasikan Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI).

Sumber

beritasatu.com, 26 Oktober 2023;
cnbcindonesia, 27 Oktober 2023;
kompas.com, 28 Oktober 2023;
kompas.id, 26 Oktober 2023;
republika.co.id, 26 Oktober 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @anlegbkdoofficial

©PuslitBK2023